

Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang

Masdar Ryketeng¹ , Nurafni Oktaviyah², dan Warka Syachbrani^{✉3}

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang periode Tahun 2018-2021. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2018-2021. Teknik analisis menggunakan rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan masih perlu ditingkatkan karena derajat desentralisasi pemerintah daerah tergolong kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah berada pada tingkat sangat tinggi, dan rasio kemandirian keuangan daerah termasuk rendah sekali. Sedangkan hasil positif ditunjukkan oleh perhitungan rasio efektivitas pajak daerah yang menunjukkan hasil sangat efektif, rasio keserasian menunjukkan prioritas pada belanja daerah dan modal, rasio efektifitas belanja menunjukkan tingkat yang efektif, dan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang efektif.

Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja Keuangan; Rasio Keuangan.

Abstract

This study aims to evaluate the financial performance of the Pinrang Regency Government for the 2018-2021 period. This type of research is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of documentation. This study uses secondary data obtained from the 2018-2021 Pinrang Regency Government Revenue and Expenditure Budget Realization Report. The analysis technique uses financial ratios, namely the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, the ratio of regional financial independence, the ratio of local tax effectiveness, the ratio of compatibility, the ratio of spending efficiency, and the growth ratio. The results of this study indicate that financial performance still needs to be improved because the degree of decentralization of local government is classified as lacking, the regional financial dependency ratio is at a very high level, and the regional financial independence ratio is very low. While the positive results are shown by the calculation of the ratio of the effectiveness of local taxes which shows very effective results, the compatibility ratio shows the priority on regional and capital spending, the ratio of spending effectiveness shows the effective level, and the ratio of growth in income and spending of the Government of Pinrang Regency shows an effective growth rate.

Keywords: Evaluation; Financial performance; Financial Ratios.

Copyright (c) 2023 Warka Syachbrani

✉ Corresponding author :

Email Address : warkasyachbrani@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja dilakukan oleh semua organisasi baik organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan sebagai upaya penilaian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses yang telah dijalankan. Pada organisasi pemerintahan, salah satu pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja merupakan sistem keuangan atau non keuangan yang berasal dari pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil dari aktivitas yang menjadi bagian dari suatu proses atau suatu organisasi. Sedangkan, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkatan capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah termasuk penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan (Darise, 2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tersebut telah dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta transaksi selama satu periode tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sebagai bentuk penilaian terhadap akuntabilitas dan efektifitas dari pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait aktifitas pelayanan publik. Akuntabilitas pengelolaan anggaran menilai tingkat serapan anggaran dan penggunaan anggaran serta kesesuaian pengalokasian anggaran tersebut dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif dapat dicapai dengan menggunakan alat analisis yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut mampu digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, menentukan derajat kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja yang terkait dengan kepentingan publik dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi dan pemulihan kinerja dengan pebanding skema kerja dan pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dapat pula digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode selanjutnya. Adapun bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa

perhitungan APBD. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan (Hery, 2015).

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja keuangannya melalui penggambaran yang jelas tentang kinerja yang dilakukannya. Penilaian kinerja yang dimaksud harus dapat menjadi sumber informasi yang transparan bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat turut andil dalam mengatur dan mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap hasil dari kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dianggarkan dan direalisasikan (Halim, 2012). Interpretasi mengenai hasil perhitungan rasio keuangan menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau antara satu daerah dengan daerah lain untuk mendapatkan perbedaannya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002). Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Terdapat beberapa cara dalam mengukur kinerja keuangan daerah, salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah, Adapapun rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi. Derajat desentralisasi adalah salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2016).

Tabel 1. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

No.	Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan Daerah
1.	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
2.	10,01 – 20,00	Kurang
3.	20,01 – 30,00	Sedang
4.	30,01 – 40,00	Cukup
5.	40,01 – 50,00	Baik
6.	>50,00	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2016)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat/ provinsi dapat diketahui melalui pengukuran dengan rasio ketergantungan daerah yang mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Menurut (Mahmudi, 2016), rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan pendapatan transfer dan total pendapatan. Semakin besar tingkat rasio ketergantungan daerah maka semakin besar pula ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana eksternal.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No.	Persentase Pendapatan	Ketergantungan Keuangan Daerah
	Transfer terhadap Total Pendapatan	
1.	0,00 – 10,00	Sangat Rendah
2.	10,01 – 20,00	Rendah
3.	20,01 – 30,00	Sedang
4.	30,01 – 40,00	Cukup
5.	40,01 – 50,00	Tinggi
6.	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Mahmudi (2016)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Persentase PAD

No.	Persentase PAD terhadap	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
	Terhadap transfer pusat + Provinsi + Pinjaman		
1.	0% – 25%	Rendah Sekali	Instruktif
2.	25% – 50%	Rendah	Konsultatif
3.	50% – 75%	Sedang	Partisipatif
4.	75% – 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2016)

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah. rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya yang ada di daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas di kategori kan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Halim, 2012).

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektivitas Pajak Daerah

No.	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Efektivitas Pajak Daerah
	Daerah terhadap Target Penerima Pajak Daerah	
1.	>100	Sangat Efektif
2.	100	Efektif
3.	90 - 99	Cukup Efektif
4.	75 - 89	Kurang Efektif
5.	<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

5. Rasio Keserasian. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2012). Rasio keserasian antara lain berupa rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja (Mahmudi, 2016).
6. Rasio Efisiensi Belanja. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan, hasil dari rasio ini tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini dan suatu Pemerintah Daerah telah melaksanakan efisiensi belanja apabila rasio ini kurang dari 100%, namun jika rasio lebih dari 100% berarti tidak efisien (Mahmudi, 2016).
7. Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, dan dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2012). Rasio pertumbuhan dilihat dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal).

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (Harahap, 2020) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Selanjutnya, Hafizi dan Amalia (2022) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Jember dilihat dari rasio efektivitas pajak daerah kategori cukup efisien. Rasio belanja operasi atas total belanja lebih besar dari rasio belanja modal atas total belanja. Rasio efisiensi belanja kategori efisien. Rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan memiliki pertumbuhan yang positif. Rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal memiliki pertumbuhan yang positif. Namun demikian terdapat beberapa rasio yang mempunyai hasil yang belum baik, yaitu, derajat desentralisasi kategori kurang, rasio ketergantungan kategori sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah kategori rendah sekali dan berada pada pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan pemerintah daerah (Hafizi & Amalia, 2022).

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian replika dari penelitian terdahulu. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan. Perbedaan dari penelitian

sebelumnya adalah objek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitian ini dipilih karena letak geografis Kabupaten Pinrang sangat strategis dan sumber daya yang melimpah. Hal ini bisa menjadi potensi keuangan bagi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah jika pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan berjalan baik.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain (Sugiyono, 2012). Selanjutnya, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang yaitu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dengan mempertimbangkan tujuan dan fokus penelitian pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2019). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik, dan dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Teknik analisis yang dilakukan adalah menghitung rasio keuangan, menilai kinerja keuangan, dan melakukan interpretasi terhadap rasio keuangan tersebut dengan membandingkan hasil perhitungan kinerja keuangan daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Derajat Desentralisasi.

Derajat desentralisasi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No. 1	Tahun 2	Pendapatan Asli Daerah 3	Total Pendapatan 4	Derajat Desentralisasi 5 (3:4)
1.	2018	130.651.477.245,38	1.282.671.059.726,38	10,19%
2.	2019	133.363.942.030,14	1.300.927.793.264,83	10,25%
3.	2020	131.176.927.320,35	1.312.939.658.814,18	9,99%
4.	2021	134.066.655.485,33	1.272.417.859.811,33	10,54%
	Rata-Rata	132.314.750.520,30	1.292.239.092.904,18	10,24%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, Pemerintah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi pada derajat desentralisasinya. Rata-rata derajat desentralisasi selama empat tahun adalah 10,24%. Jika dibandingkan dengan rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 6,55% (Harahap, 2020) dan rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Jember sebesar 17,81% (Hafizi & Amalia, 2022), hal ini mempunyai arti bahwa derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki derajat desentralisasi lebih bagus dibandingkan Kabupaten Tapanuli Tengah dan memiliki derajat desentralisasi lebih buruk dibandingkan Kabupaten Jember. Berdasarkan kriteria penilaiantingkat derajat desentralisasi yang mana terdapat perbandingan pendapatan asli daerah dan total pendapatan yang besar sehingga membuat derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang tergolong kurang.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No. 1	Tahun 2	Pendapatan Transfer 3	Total Pendapatan 4	Rasio Ketergantungan 5 (3:4)
1.	2018	1.101.027.903.363,00	1.282.671.059.726,38	85,84%
2.	2019	1.114.434.013.457,69	1.300.927.793.264,83	85,66%
3.	2020	1.117.954.673.852,83	1.312.939.658.814,18	85,15%
4.	2021	1.080.037.744.405,00	1.272.417.859.811,33	84,88%
	Rata-Rata	1.103.363.583.769,63	1.292.239.092.904,18	85,38%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6, Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pinrang memiliki rata-rata **85,38%**. Jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 94,03% (Harahap, 2020) dan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jember sebesar 79,53% (Hafizi & Amalia,

2022), maka dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pinrang lebih tinggi dari rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jember dan lebih rendah dari rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori mempunyai ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, artinya pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat/provinsi.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
1	2	3	4	5 (3:4)
1.	2018	130.651.477.245,38	1.246.827.870.909,84	10,48%
2.	2019	133.363.942.030,14	1.191.764.997.470,91	11,19%
3.	2020	131.176.927.320,35	1.202.623.379.557,88	10,91%
4.	2021	134.066.655.485,33	1.152.573.522.308,23	11,63%
Rata-Rata		132.314.750.520,30	1.198.447.442.561,71	11,04%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 7, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2018-2021 memperlihatkan hasil yang fluktuatif. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan dan penurunan pada pendapatan asli daerah yang ditunjukkan pada kenaikan dan penurunan pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan penyumbang terbesar pada komponen PAD. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah 11,04%. Jika dibandingkan dengan rasio kemandirian Kabupaten Jember sebesar 22,42% (Hafizi & Amalia, 2022), maka dapat diartikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pinrang jauh di bawah Kabupaten Jember. Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang memiliki persentase tingkat kemandirian yang tergolong rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif artinya pemerintah daerah pemerintah daerah tergolong sebagai pemerintah yang tidak dapat melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah
1	2	3	4	5 (3:4)
1.	2018	25.817.574.562,00	23.234.000.000,00	111,12%
2.	2019	29.855.766.183,00	24.179.500.000,00	123,48%
3.	2020	31.362.250.639,00	27.446.621.028,00	114,27%
4.	2021	35.439.158.745,00	30.790.564.000,00	115,10%
	Rata-Rata	30.618.687.532,25	26.412.671.257,00	115,92%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 8, rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2018-2021 memperlihatkan penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Pinrang selama empat tahun adalah 115,92%. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan rasio efektivitas pajak daerah Pemerintah Kabupaten Jember sebesar 97,67% (Hafizi & Amalia, 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa rasio efektivitas pajak daerah pemerintah Kabupaten Pinrang lebih tinggi dari rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Jember karena pemerintah merealisasikan target pajak daerah dengan cukup efektif. Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki kinerja yang baik untuk merealisasikan target pajak daerah yang dilihat setiap tahun rasio efektivitas melebihi 100% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

5. Rasio Keserasian

Rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rumus rasio belanja operasi terhadap total belanja rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja
1	2	3	4	5 (3:4)
1.	2018	988.188.835.229,00	1.351.140.043.260,00	73,14%
2.	2019	993.819.490.698,00	1.293.600.671.573,00	76,83%
3.	2020	941.363.802.254,00	1.325.082.586.616,00	71,04%
4.	2021	1.000.443.815.908,00	1.293.820.146.095,00	77,32%

Rata-Rata	980.953.986.022,25	1.315.910.861.886,00	74,55%
-----------	--------------------	----------------------	--------

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 9, rasio keserasian menurut rasio belanja operasi atas total belanja menunjukkan fluktuatif yang disebabkan adanya alokasi belanja atas belanja operasi terjadi pengurangan dan penambahan. Rata-rata rasio belanja operasi atas total belanja Pemda Kabupaten Pinrang adalah 74,55%. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, rata-rata rasio belanja operasi atas total belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebesar 73,07% (Hafizi & Amalia, 2022), maka dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang banyak mengeluarkan untuk belanja operasional dari pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Rasio keserasian juga dapat diukur dengan menggunakan rumus rasio belanja modal terhadap total belanja rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
1	2	3	4	5 (3:4)
1.	2018	225.073.910.031,00	1.351.140.043.260,00	16,66%
2.	2019	155.704.603.975,00	1.293.600.671.573,00	12,04%
3.	2020	237.109.008.321,00	1.325.082.586.616,00	17,89%
4.	2021	155.359.754.689,00	1.293.820.146.095,00	12,01%
	Rata-Rata	193.311.819.254,00	1.315.910.861.886,00	14,69%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 10, rasio belanja modal atas total belanja menunjukkan fluktuatif. Rata-rata rasio belanja modal atas total belanja selama empat tahun adalah 14,69%. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Daerah Jember sebesar 17,42% (Hafizi & Amalia, 2022), maka dapat diartikan bahwa dari total belanja yang dimiliki kedua pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih banyak digunakan untuk belanja modal dari Pemerintah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil analisis rasio keserasian, sebagian besar dana Pemerintah Kabupaten Pinrang masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dan belanja modal yang dilakukan masih relatif kecil dibandingkan daerah lain.

6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
1	2	3	4	5 (3:4)
1.	2018	1.351.140.043.260,00	1.442.699.854.198,84	93,65%
2.	2019	1.293.600.671.573,00	1.374.026.268.752,00	94,15%
3.	2020	1.325.082.586.616,00	1.407.654.270.520,05	94,13%
4.	2021	1.293.820.146.095,00	1.374.460.808.334,00	94,13%
Rata-Rata		1.315.910.861.886,00	1.399.710.300.451,22	94,01%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 11, rasio efisiensi belanja daerah mengalami kenaikan dan penurunan dalam empat tahun. Rata-rata rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah 94,01%. Jika dibandingkan rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Jember sebesar 83,66% (Hafizi & Amalia, 2022), maka dapat diartikan bahwa Kabupaten Jember relatif lebih efisien dari Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan perhitungan hasil analisis rasio efisiensi belanja, pada realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak melebihi anggaran belanjanya. Efisiensi belanja pemerintah daerah dapat dilihat dari realisasi yang telah dilakukan pemerintah daerah tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Dampak dari efisiensi ini dapat dirasakan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas publik dan pelayanan lainnya.

7. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PADTt} - \text{PADTt-1})}{\text{PADTt-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{(\text{TPTt} - \text{TPTt-1})}{\text{TPTt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PADTt : Pendapatan Asli Daerah Tahun t
 PADTt-1 : Pendapatan Asli Daerah Tahun t-1
 TPTt : Total Pendapatan Tahun t
 TPTt-1 : Total Pendapatan Tahun t-1

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Realisasi PAD Tahun t	Realisasi PAD Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan PAD
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1.	2018	130.651.477.245,38	118.859.698.609,48	11.791.778.635,90	109,92%
2.	2019	133.363.942.030,14	130.651.477.245,38	2.712.464.784,76	102,08%
3.	2020	131.176.927.320,35	133.363.942.030,14	-2.187.014.709,79	98,36%

4.	2021	134.066.655.485,33	131.176.927.320,35	2.889.728.164,98	102,20%
	Rata-Rata	132.314.750.520,30	128.513.011.301,34	3.801.739.218,96	103,14%

Sumber : Data diolah, 2022

Sedangkan, hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan Tahun t	Realisasi Pendapatan Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan PAD
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1.	2018	1.282.671.059.726,38	1.221.185.916.613,48	61.485.143.112,90	105,03%
2.	2019	1.300.927.793.264,83	1.282.671.059.726,38	18.256.733.538,45	101,42%
3.	2020	1.312.939.658.814,18	1.300.927.793.264,83	12.011.865.549,35	100,92%
4.	2021	1.272.417.859.811,33	1.312.939.658.814,18	-40.521.799.002,85	96,91%
	Rata-Rata	1.292.239.092.904,18	1.279.431.107.104,72	12.807.985.799,46	101,07%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 12 dan 13, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan dan penurunan sedangkan rasio pendapatan pemerintah daerah mengalami penurunan selama empat tahun. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD 103,14% dan rasio pertumbuhan pendapatan 101,07%. Hasil perhitungan rasio tersebut memperlihatkan pertumbuhan yang positif yang berarti bahwa adanya peningkatan kinerja keuangan PAD Pemerintah Kabupaten Pinrang. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Jember adalah 11,38% dan 5,22% (Hafizi & Amalia, 2022), maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Jember .

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{(\text{BOTt} - \text{BOTt} - 1)}{\text{BOTt} - 1} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{(\text{BMTt} - \text{BMTt} - 1)}{\text{BMTt} - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

BOTt : Pendapatan Operasi Tahun t

BOTt-1 : Pendapatan Operasi Tahun t-1

BMTt : Belanja Modal Tahun t

BMTt-1 : Belanja Modal Tahun t-1

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 - 2021

No.	Tahun	Realisasi Belanja Operasi Tahun t	Realisasi Belanja Operasi Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1.	2018	988.188.835.229,00	885.724.073.440,00	102.464.761.789,00	111,57%
2.	2019	993.819.490.698,00	988.188.835.229,00	5.630.655.469,00	100,57%
3.	2020	941.363.802.254,00	993.819.490.698,00	-52.455.688.444,00	94,72%
4.	2021	1.000.443.815.908,00	941.363.802.254,00	59.080.013.654,00	106,28%
	Rata-Rata	980.953.986.022,25	952.274.050.405,25	28.679.935.617,00	103,28%

Sumber : Data diolah, 2022

Sedangkan, hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2021

No	Tahun	Realisasi Belanja Modal Tahun t	Realisasi Belanja Modal Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1.	2018	225.073.910.031,00	257.496.784.123,00	-32.422.874.092,00	87,41%
2.	2019	155.704.603.975,00	225.073.910.031,00	-69.369.306.056,00	69,18%
3.	2020	237.109.008.321,00	155.704.603.975,00	81.404.404.346,00	152,28%
4.	2021	155.359.754.689,00	237.109.008.321,00	-81.749.253.632,00	65,52%
	Rata-Rata	193.311.819.254,00	218.846.076.612,50	-25.534.257.358,50	93,60%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 14 dan 15, rasio pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi yang ditunjukkan adanya penambahan dan penurunan realisasi belanja selama empat tahun. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 103,28% dan 93,60%. Pertumbuhan belanja Kabupaten Pinrang diikuti pertumbuhan pendapatannya. Jika dibandingkan dengan rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Jember sebesar 1,39% dan 12,31% (Hafizi & Amalia, 2022), maka dapat diartikan bahwa pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Jember maka pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang juga lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi yang merupakan akibat dari perubahan besaran dana alokasi umum setiap tahunnya. Meskipun pertumbuhan pendapatan dan belanja fluktuatif, namun pertumbuhan yang dialami Pemerintah Kabupaten Pinrang masih dapat dikatakan positif.

SIMPULAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan perhitungan rasio masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan oleh derajat desentralisasi yang masing tergolong kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, dan rasio kemandirian keuangan daerah termasuk rendah sekali. Namun demikian, kinerja keuangan yang baik ditunjukkan rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan hasil yang sangat efektif, rasio keserasian menunjukkan prioritas pada belanja operasional, rasio efisiensi belanja termasuk kategori efektif, dan rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja yang menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Penelitian ini masih banyak keterbatasan dan perlu dilakukan perbaikan pada penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan indikator dalam penentuan kinerja keuangan masih menggunakan indikator yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan belum mendapatkan sesuai aturan kebijakan perundang-undangan. Penelitian berikutnya diharapkan mencari detail informasi mengenai aturan penilaian kinerja keuangan sesuai undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan memaksimalkan identifikasi potensi daerah dan memanfaatkan sumber daya yang sudah dikelola sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Peningkatan pendapatan asli daerah juga mampu meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Referensi :

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Darise, N. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*. 05(02), 116–130.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. CAPS.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.